



# Buletin Parlementaria

Nomor 1024/II/IX/2018 • September 2018



39<sup>TH</sup> GENERAL ASSEMBLY OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY

3 - 7 September 2018 | Singapore

Towards a Resilient and Innovative Community



## Kekompakan ASEAN Kuatkan Kerja Sama Kawasan



9 772614 339005

Aneka Lomba Dekatkan DPR dengan Rakyat



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berfoto bersama Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-39 AIPA

Foto: Jaka/hr

## Kekompakan ASEAN Kuatkan Kerja Sama Kawasan

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan untuk mewujudkan Komunitas *Association of South East Asia Nations (ASEAN)* yang tangguh diperlukan kepedulian serta keterlibatan aktif seluruh negara anggota ASEAN. Terlebih, telah menjadi komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang berorientasi ke luar dengan tetap mempertahankan sentralitas ASEAN.**

“Masa depan ASEAN tergantung dari bagaimana negara-negara ASEAN mampu meraih peluang dan menghadapi berbagai tantangan global saat ini. Karenanya, dibutuhkan keterlibatan aktif serta kekompakan dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menguatkan kerjasama kawasan,” tegas Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam Sidang Umum ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* ke-39 di Singapura, Selasa (04/9).

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, jika para anggota AIPA serius membangun ASEAN yang terfokus

pada kesejahteraan masyarakatnya, maka pemenuhan hak-hak masyarakat menjadi suatu keharusan. Permasalahan kemanusiaan yang masih terjadi di kawasan, seperti di Myanmar, harus segera diselesaikan dengan baik.

“Krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar telah mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi dan terus menjadi perhatian dunia. Karena itu, Indonesia mendukung penuh segala upaya untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, penegakan hukum serta rekonsiliasi secara menyeluruh di kawasan ASEAN,” tandas Bamsoet.

Ia juga meminta AIPA berbenah diri dan memperbaharui sistem pengambilan keputusan. AIPA harus mampu menawarkan kebaruan dan tidak anti reformasi. Sehingga, resolusi-resolusi yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan di kawasan.

“AIPA harus memiliki alternatif pengambilan keputusan yang berpihak pada mayoritas negara anggota AIPA. Untuk membantu perwujudan Komunitas ASEAN yang inovatif, AIPA harus mampu pula berinovasi dalam sistem pengambilan keputusan. Sehingga, tidak lagi kita temui pengalaman suatu Komisi di AIPA tidak

dapat bersidang karena Komisi Eksekutif tidak mencapai kata sepakat mengenai agenda di Komisi tersebut,” urai Bamsoet.

Politisi dapil Jawa Tengah VII ini menegaskan, terlepas dari perbedaan sistem politik atau ukuran konstituen, anggota parlemen yang tergabung dalam AIPA harus melihat dirinya sebagai agen perubahan. Inklusivitas Komunitas ASEAN bergantung pada upaya para anggota parlemen untuk menjangkau konstituen dan menyebarkan kesadaran akan posisi mereka sebagai warga ASEAN.

“Tidak akan ada komunitas tanpa rakyat. Oleh karena itu, kepentingan rakyat harus menjadi inti dari Visi ASEAN 2025. AIPA sebagai legitimasi perwakilan rakyat ASEAN, tentunya harus mengambil posisi strategis untuk mewujudkan Visi ASEAN 2025 melalui kerangka mandat konstitusi pembentukan legislasi, persetujuan penganggaran dan pelaksanaan pengawasan,” ujar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memaparkan, berbagai perkembangan positif telah diraih sejak dimulainya implementasi *road map* (peta jalan) Masyarakat ASEAN. *Road map* tersebut terdiri dari cetak biru masyarakat politik-keamanan ASEAN, cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN dan masyarakat sosial-budaya ASEAN di tahun 2019.

“Perkembangan positif dari *road map* tersebut berhasil membawa kawasan menuju pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. Namun, kita jangan berbangga hati dan berpuas diri. Masih banyak yang harus dilakukan

untuk memaksimalkan potensi ASEAN agar dapat mewujudkan masyarakat ASEAN yang tangguh dengan kapasitas yang tinggi untuk merespons tantangan global secara efektif,” kata Bamsoet.

Secara khusus, Bamsoet memuji ASEAN yang telah berdiri lebih dari 50 tahun, terbukti mampu menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi. ASEAN juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara anggotanya di tengah dinamika geopolitik global.

“Capaian tersebut tidaklah mudah. Terlebih, negara-negara di kawasan Asia Tenggara sangat beragam latar belakangnya, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya, agama maupun tingkat demokrasi. Tentu, tanpa adanya persatuan dan rasa memiliki di antara warga ASEAN sukar untuk meraih capaian tersebut. Sikap seperti inilah yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh semua warga ASEAN,” pungkas Bamsoet.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Juliari Batubara (Fraksi PDI-P), dan sejumlah Anggota DPR RI diantaranya Endang Srikarti Handayani (Fraksi Partai Golkar), Jon Erizal (Fraksi PAN), Abdul Kadir Karding (Fraksi PKB), Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), Kartika Yudhisti (Fraksi PPP), Amelia Anggraini (Fraksi Nasdem), Sudiro Asno (Fraksi Hanura) dan Mukhammad Misbakhun (Fraksi Partai Golkar). ■jk/sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Sofyan Efendi

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske  
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,  
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,  
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,  
Azka Restu Fadilah, Gerald Opie

**ADMINISTRASI**  
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Delegasi DPR RI pada Sidang Umum AIPA ke-39



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini saat Sidang Umum AIPA ke-39

Foto: Husen/hr

## Komite Politik AIPA Tak Hasilkan Resolusi

**Komite Politik pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-39 yang membahas isu-isu politik, demokrasi, HAM, dan lain-lain, berakhir tanpa satu pun resolusi yang dihasilkan. Draf resolusi menyangkut situasi kemanusiaan Rohingya usulan DPR RI ditolak Parlemen Myanmar.**

**K**arena Parlemen Myanmar menolak draf resolusi tersebut, maka Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menolak semua usulan draf resolusi lainnya yang sudah dibahas Komite Politik pada Sidang AIPA di Singapura, Rabu (05/9).

Mekanisme pengambilan keputusan lewat konsesus membuat pengambilan keputusan kerap mandek. Bila ada satu negara saja tak setuju, maka keputusan tidak bisa diambil oleh komite. Inilah yang terjadi pada Komite Politik.

Akhirnya, tak ada resolusi yang dihasilkan, karena saling memveto.

Fadli mengemukakan hal itu usai mengikuti rapat maraton dari pagi hingga sore hari. Isu sensitif dan krusial menyangkut Rohingya paling banyak mendapat perhatian.

Fadli yang didampingi Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Jazuli Juwaini mengaku kecewa dengan sikap Parlemen Myanmar. "Sudah jelas ada pelanggaran hak asasi di sana, hingga PBB menyatakan ada genosida yang dilakukan Pemerintah Myanmar," katanya.

Sebelumnya, sidang sempat diskors dua kali karena alotnya pembahasan.

Fadli dan Jazuli sebetulnya sudah ingin meninggalkan ruang sidang sebagai protes atas sikap Myanmar. Namun, pimpinan sidang memanggilnya kembali untuk tetap duduk. Ketika pimpinan sidang meminta sikap parlemen ASEAN lainnya, sebagian ada yang menyatakan absen atas persoalan Rohingya. Resolusi pun gagal dituangkan.

"Kami membawa amanah rakyat Indonesia untuk memperjuangkan nasib masyarakat Rohingya. Saya sendiri sudah melihat langsung penderitaan yang menimpa masyarakat Rohingya di perbatasan Banglades. Para wanita diperkosa, keluarganya dibunuh, dan rumahnya dibakar," ungkap Fadli.

Sikap Fadli dan Jazuli ini menunjukkan konsistensinya untuk memperjuangkan hak paling mendasar atas HAM. Sikap tersebut mendapat apresiasi dari para koleganya dan sebagian parlemen ASEAN. ■ mh/sf

# Nilai Perdagangan Indonesia - Chile Surplus

**Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyampaikan, nilai perdagangan Indonesia-Chile sudah surplus, mencapai angka 60 juta dolar Amerika Serikat (AS). Total perdagangan kedua negara mendekati 300 juta dolar AS, atau tepatnya 278 juta dolar AS. Utut mendorong, selain kerja sama perdagangan yang sudah berjalan, potensi kerja sama lain kedua negara juga harus dimaksimalkan.**

sangatlah banyak. Ini yang nanti akan kita coba dorong dengan mitra-mitra kita di parlemen, seperti Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pariwisata,” kata Utut.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Chile merupakan negara yang ekonominya termakmur di kawasan Amerika Latin. Meskipun dari sisi sumber daya alam, Chile tidak semelimpah negara-negara tetangga, namun Chile menjadi negara yang ekonominya termakmur di kawasan Amerika Latin.

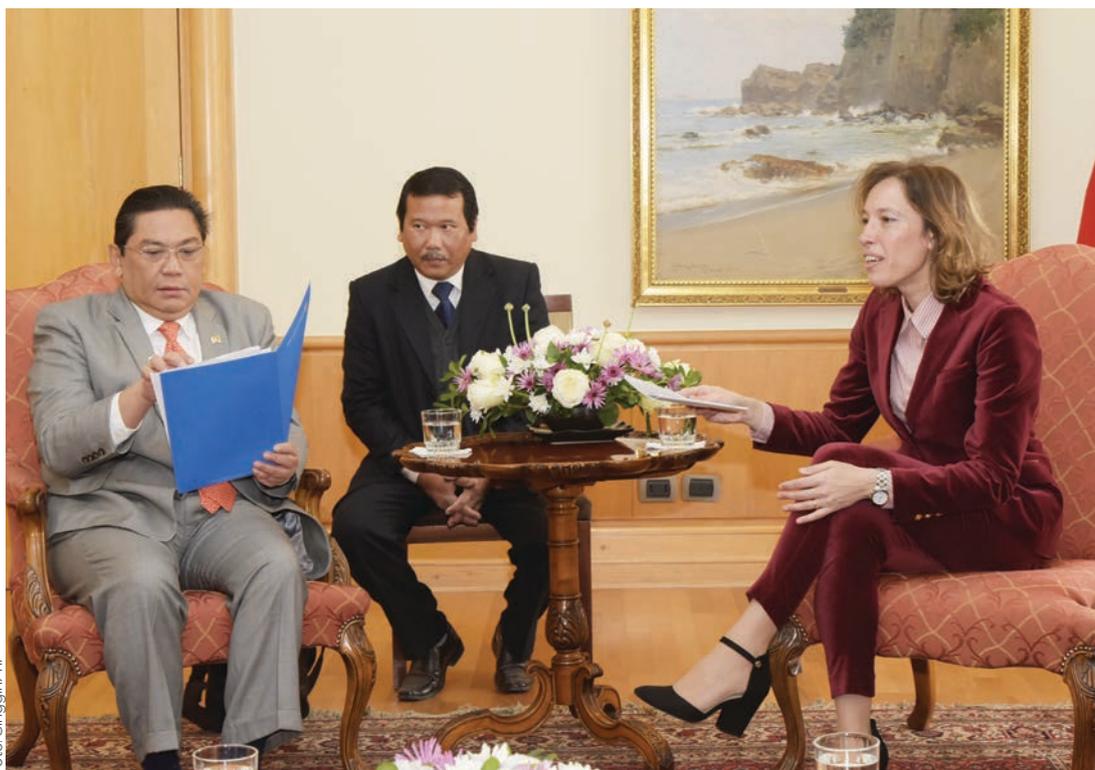
“Kita tahu bahwa, Chile merupakan

negara yang memanjang bentuknya. Di sini ada Pegunungan Andes dan pegunungan lainnya. Mereka bisa mendapat penghasilan yang sangat besar dari pariwisata, tentu ada baiknya kita belajar dari mereka dan mereka juga membuka ruang untuk kerja sama yang lebih baik lagi. Kita sendiri menyatakan Indonesia sebenarnya pasar besar untuk investasi mereka,” jelas Utut.

Politisi dapil Jateng itu juga menyadari bahwa ada satu hambatan yang tidak mudah bagi kedua negara yaitu jarak antara kedua negara yang begitu jauh. Namun, Utut menegaskan bahwa Indonesia harus tetap memperluas pasar dan membuat

diversifikasi *partner* di seluruh dunia. Jadi, kerja sama tidak bisa hanya dengan satu negara. Makin banyak berhubungan dengan negara lain akan semakin baik.

Sebagaimana diketahui bahwa, Pemerintah Indonesia dan Republik Chile telah menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang akan menghapuskan tarif bea masuk produk dalam negeri untuk 7.669 pos tarif atau hampir 90 persen dari seluruh pos tarif Chile. Di sisi lain, jika staf KBRI di Chile kekurangan staf, ia akan mendorong adanya penambahan staf guna memaksimalkan potensi kerja sama kedua negara. ■ *skr/sf*



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto bersama Sekjen Kemenlu Chile

Sejak tahun 2016, nilai perdagangan Indonesia dengan Chile sudah surplus diangka sekitar 60 juta dolar AS.

Namun itu belum menggambarkan potensi sesungguhnya. Kita mendorong dan akan kita jembatan agar potensi kerja sama kedua negara bisa maksimal, karena selama ini kita belum terbuka dengan potensi kerja sama yang ada,” ungkap Utut di Santiago, Chile, Kamis (30/8).

Utut menyampaikan, dalam pertemuan antara Delegasi DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Chile membahas banyak hal, terutama dalam rangka peningkatan kerja sama kedua negara dan tindak lanjut dari MoU-MoU

yang belum terselesaikan. Menurutnya, peluang kerja sama kedua negara sangat banyak.

“Dalam pertemuan ini yang penting ada tindak lanjut. Kita memahami bahwa sebetulnya peluang antara kedua negara

**Meskipun dari sisi sumber daya alam, Chile tidak semelimpah negara-negara tetangga, namun Chile menjadi negara yang ekonominya termakmur di kawasan Amerika Latin.**

## Pantau Pasca Gempa, Fahri Hamzah Belum Temukan Bantuan untuk Sumbawa



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memantau penanganan pasca gempa di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat



**Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memantau penanganan pasca gempa Lombok, khususnya di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari hasil pemantauan, secara umum pemerintah belum menurunkan dana apapun yang terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa NTB. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, rumah ibadah dan lainnya belum tersentuh bantuan dan terjadi silang kepentingan dalam penanganan.**

“Pemerintah daerah telah siap dengan verifikasi dan implementasi, namun uang untuk bantuan itu cuma dibicarakan pemerintah pusat. Belum ada wujudnya,” kata Fahri saat berdialog dengan warga di lapangan Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, Rabu (05/9).

Fahri dan Anggota DPRD Provinsi NTB Nurdin Ranggabarani juga menyambangi Pulau Bungin yang lokasinya sangat dekat dengan episentrum gempa 19 Agustus. Di Pulau Bungin dan Kecamatan Taliwang, Fahri menyerahkan simbolis bantuan kepada Wakil Bupati Sumbawa Barat dan Kwardcab Pramuka Sumbawa Barat.

Di Sumbawa perhatian publik dan pemerintah pusat tidak maksimal karena fokus bantuan ada di Pulau Lombok, yang memang lebih awal diguncang gempa. Padahal di Sumbawa kerusakan tak kalah parah hanya dalam satu guncangan 6,9 Skala Richter (SR) pada 19 Agustus lalu.

Selain politisi dapil NTB itu melakukan inspeksi dan memberikan pengarahan di Posko Bencana di Kecamatan Alas dan Kecamatan Taliwang. Di sekolah darurat di Alas, Fahri menyemangati siswa SD Negeri, dialog dengan warga di Desa Lamunga, kemudian menyertai warga sholat Maghrib hingga Isya di Meraran, Seteluk.

Di Pulau Bungin 24 rumah terbakar dan sebagian lainnya ambruk akibat gempa. Selain itu di wilayah Alas beberapa sekolah ambruk. Di Kabupaten Sumbawa Besar, di Desa Lamunga dan Desa Meraran, Kecamatan Seteluk puluhan rumah roboh dan hingga hari ini warga masih tinggal di lapangan dengan tenda-tenda seadanya.

Sebelumnya, dalam dialog sinkronisasi penanganan pasca gempa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9) lalu, Fahri meminta pemerintah untuk membangun posko nasional di Lombok untuk memudahkan koordinasi penanganan usai gempa. Sebab menurut dia, kehadiran pemerintah pusat dalam membentuk posko nasional menjadi keharusan karena banyak para pejabat daerah juga terkena gempa.

“Setelah Lombok Utara diguncang gempa, banyak para pejabat yang terkena dampak,” kata Fahri sambil menambahkan bahwa kehadiran posko nasional juga akan membangkitkan solidaritas sosial masyarakat untuk dapat menghadapi bencana. Selain itu, Fahri meminta tiap lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan gempa melakukan sinkronisasi data agar tidak berbeda satu sama lain. ■ iw/sf



Foto: Rumi/hr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersiap membuka kegiatan "Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat" di Kompleks Parlemen

## Aneka Lomba Dekatkan DPR dengan Rakyat

**Memperingati HUT ke-73 Kemerdekaan RI dan HUT ke-73 DPR RI, DPR RI sebagai rumah rakyat berkomitmen untuk semakin terbuka dan mendekatkan diri dengan rakyat. Berbagai kegiatan yang dilakukan guna mendekatkan wakil rakyat ini dengan rakyatnya, salah satunya melalui kegiatan bersepeda santai yang diikuti 1500 peserta dari seluruh kalangan masyarakat.**

“ Saya gembira kita bisa berkumpul dalam suasana santai seperti ini. ‘Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat’ ini sebagai komitmen DPR berada di tengah-tengah rakyat,” ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka kegiatan “Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat” di halaman Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (02/9).

Menurut Bamsuet, sapaan akrabnya, pelibatan masyarakat dalam serangkaian

kegiatan HUT DPR RI merupakan bagian dari partisipasi politik dalam berdemokrasi. Sebab, tanpa dukungan rakyat, DPR RI tidak akan bermakna.

“Mudah-mudahan dari bersepeda nanti bersama beberapa Anggota DPR bisa mendapatkan masukan dari bapak ibu,” papar Bamsuet sembari mengibarkan bendera tanda gowes sehat dimulai.

Kegiatan Gowes Sehat ini turut dimeriahkan oleh Wakil DPR RI Fadli Zon

dan beberapa Anggota DPR RI lainnya, seperti Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, Masinton Pasaribu, Akbar Faizal, dan Muslim Ayub.

Kegiatan Gowes Sehat dibuka dengan penampilan Marching Band dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dilanjutkan dengan beragam kegiatan lainnya, antara lain Lomba Panjat Bambu Betung dan Lomba Mewarnai untuk anak-anak. Selama kegiatan berlangsung, terlihat animo masyarakat cukup tinggi.

Peserta bersepeda santai dimulai dari pelataran Gedung DPR RI - Bundaran Hotel Indonesia - Gedung DPR RI. Diharapkan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat bisa selalu dihadirkan dalam berbagai kesempatan, untuk mendekatkan DPR RI dengan rakyat. ■ ann/sf

# DPR Tetapkan Pimpinan Pansus RUU Daerah Kepulauan

**Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan. Anggota DPR RI Edison Betaubun terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Penyerahan palu sidang dari Fahri kepada Edison pun menjadi simbolis penetapan pimpinan Pansus.**

RUU Daerah Kepulauan merupakan pemenuhan janji pemerintah, seperti *tagline* pemerintah poros maritim. Maka ini akan menjadi *platform* bagi pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi daerah kepulauan kita,” ungkap Fahri membuka rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9).

Sebagai landasan hukum pengembangan daerah pesisir dan pengelolaan maritim di Nusantara, besar harapan Wakil Ketua DPR

bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini agar RUU Daerah Kepulauan segera rampung sebelum masa jabatan DPR 2014-2019 berakhir.

“Ada harapan RUU ini akan selesai sebelum DPR RI ini berakhir, ini sangat penting menjadi *platform* pemerintah agar sejalan dengan poros maritim yang digagas Presiden Joko Widodo sendiri,” sambung politisi dapil NTB itu.

Ia menambahkan, RUU Daerah Kepulauan akan menjadi dasar pengalokasian anggaran yang berkeadilan bagi daerah-daerah kepulauan sebagai

fondasi poros maritim. Menurutnya, penghitungan alokasi anggaran berdasarkan luas daratan tidak proporsional seperti yang selama ini terjadi, sebab di daerah kepulauan yang luas adalah lautnya, bukan daratan.

Selengkapnya susunan Pansus RUU Daerah Kepulauan ialah, Ketua Pansus Edison Betaubun (F-PG), Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan), Wenny Warouw (F-Gerindra) dan Amir Uskara (F-PPP).

Saat penetapan pimpinan Pansus, ke-10 fraksi di DPR bersepakat untuk mencalonkan Anggota DPR RI yang berasal dari 8 provinsi berciri kepulauan, yaitu Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. ■ **ann/sf**



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan

# Komisi II Pantau Pelayanan Publik Pemkot Semarang

**Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ada lima aspek yang menjadi perhatian. Pertama, pihaknya ingin melihat bagaimana Pemkot Semarang menerapkan pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik kepada masyarakat.**

**K**edua, Komisi II DPR RI ingin melihat upaya Pemkot Semarang dalam memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel). Ketiga, bagaimana koordinasi Pemkot dengan Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah terkait penyelesaian pengaduan permasalahan pelayanan publik. Dan terakhir, pihaknya menanyakan jumlah permasalahan pelayanan publik/ perizinan yang ditangani oleh Pemkot Semarang. “Dari pemaparan yang disampaikan



Tim Kunspek Komisi II DPR RI memantau pelayanan publik di Pemkot Semarang

Foto: Ria/hr

Wali Kota Semarang, kami sangat mengapresiasi. Kami menilai Pemkot Semarang memenuhi kriteria terhadap pelayanan prima. Ini harus menjadi contoh, terlebih pengelolaan publik yang baik ini dapat meningkatkan perekonomian di daerah Semarang sendiri,” ungkap Herman usai mendapat pemaparan dari Walikota Semarang beserta jajaran di Semarang, Jateng, Jumat (31/8).

Menjelang Pemilihan Umum tahun 2019, lanjut Herman, pihaknya menanyakan penyelesaian KTP-elektronik di Semarang, karena berkaitan dengan kewajiban warga negara dalam menyampaikan hak suaranya. Politisi Partai Demokrat mendorong permasalahan KTP-el itu dapat segera diselesaikan.

“Sebentar lagi Pemilu, administrasi utama untuk melaksanakan hak pilihnya



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais

Foto: Arief/hr

## Kondisi Maritim Bertentangan Dengan Cita-Cita Presiden

**Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais menilai kondisi sektor kelautan Indonesia saat ini sangat berbanding terbalik dengan cita-cita Presiden, yakni menjadikan poros maritim Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di dunia.**

**P**ermasalahan mengenai kedaulatan hukum kelautan yang masih tumpang tindih merupakan salah satu alasan Hanafi berpendapat demikian. Ia berpikiran bahwa saat ini pemerintah tidak akan mampu untuk

merealisisasikan hal tersebut karena waktu saat ini sudah sempit.

“Ini cuma wacana saja. Dari dulu juga sudah jadi pertanyaan. Tidak akan terealisasi karena sudah tidak ada waktunya kan sekarang,” tutur Hanafi

yaitu KTP-el. Kami berharap, ini dapat diselesaikan dengan baik. Mengingat akan ada peningkatan pertumbuhan penduduk usia 17 tahun yang harus dikelola dengan baik. Jangan sampai proses ini tidak memberikan ruang yang pasti kepada para pemilih yang sudah berhak menjadi pemilih,” pesannya, kepada Pemkot Semarang.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan pelayanan publik di Semarang di kelola dalam satu pintu, sehingga semuanya termonitoring menggunakan sistem teknologi.

“Saat ini kami sedang melakukan kesetaraan dalam kebijakan fasilitas hidup gratis di bidang kesehatan, yaitu ambulans hebat dan konsul dokter gratis. Bidang pendidikan, sekolah gratis tahun 2019. Bidang transportasi yaitu BRT sekali bayar. Bidang pariwisata, 177 kampung tematik, perbaikan taman, dan lapangan. Revitalisasi pasar, bedah rumah sebanyak 4022 rumah, PBB gratis kurang lebih 130 juta, dan terakhir gas dari TPA,” jelasnya.

Kunspek ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, yaitu Agus Susanto (F-PDI Perjuangan), Dwi Ria Latifa (F-PDI Perjuangan), Tuti N. Roosdiono (F-PDI Perjuangan), Sirmadji (F-PDI Perjuangan), Dadang S. Muchtar (F-Golkar), Firman Soebagyo (F-Golkar), Azikin Sholtan (F-Gerindra), Libert Kristo Ibo (F-Demokrat), EE. Mangindaan (F-Demokrat), Siti Sarwindah (F-PAN), Yanuar Prihatin (F-P KB), Chairul Anwar (F-PKS), Amirul Tamim (F-PPP) dan Kresna Dewanata Phrosakh (F-NasDem). ■ **rnm/sf**

di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (03/9).

Politisi PAN tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya sektor maritim memiliki anggaran yang sangat besar, termasuk juga dalam segi pertahanan dan keamanan. Akan tetapi menurutnya tidak ada inovasi yang dilakukan, sehingga terbelengkalai begitu saja.

“Sektor maritim ini punya anggaran yang besar, termasuk juga keamanan lautnya, tetapi sampai saat ini tidak ada usaha terobosan yang signifikan ke arah sana. Bahkan jangankan bicara hukumnya, membahas *raw material*-nya saja kita masih sangat lemah,” pungkash politisi dapil DI Yogyakarta itu. ■ **eps/sf**

## Komisi II Apresiasi Layanan Publik Tangerang Selatan

Layanan publik berbasis *online* di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai sudah sangat baik dan terencana. Hampir tak ada keluhan yang berarti menyangkut akses layanan perizinan sekaligus pengawasan. Setidaknya itulah yang dinilai Komisi II DPR RI saat berkunjung ke Kantor Walikota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (31/8).



Foto: Andri/hr

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, diterima langsung oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie. Turut serta dalam kunjungan ini Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali (F-Golkar) dan sejumlah Anggota Komisi II DPR RI.

Mardani mengatakan, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ini untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja layanan publik, khususnya oleh Pemerintah Kota Tangsel, guna memastikan bahwa pelayanan berbasis online ini bisa melayani masyarakat dengan cukup baik dibandingkan secara manual.

“Teknologi dan inovasi bukan lagi sebagai sebuah pilihan. Namun sudah menjadi sebuah keharusan. Teknologi dan inovasi harus dapat diwujudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat,” ungkap politisi PKS itu usai pertemuan.

Lebih lanjut Mardani menjelaskan, inovasi sudah menjadi kebutuhan instansi pemerintah guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik. Secara umum, baik di pusat dan daerah adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan pelayanan berbasis online merupakan implementasi dari visi Kota Tangsel untuk mewujudkan Tangsel sebagai kota cerdas, berkualitas, berdaya saing, berbasis teknologi dan inovasi.

“Pelayanan berbasis *online* merupakan wujud nyata Pemkot Tangsel dalam rangka terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan berbasis *online* ini juga diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kota Tangsel,” jelasnya. ■ **man/sf**

# Komisi V Dorong Pemanfaatan Bendungan Teritip Pasok Kebutuhan Air Baku Balikpapan



Foto: Oji/hr

Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Teritip Kota Balikpapan

**Komisi V DPR RI mendorong pemanfaatan air dari Bendungan Teritip untuk memasok kebutuhan air baku bagi masyarakat Balikpapan dan sekitarnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Teritip Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (30/8).**

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan harus bekerjasama dalam menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan memanfaatkan Bendungan Teritip,” imbuh Fary sembari berharap masyarakat sekitar bendungan mendapat manfaat lebih dulu dari adanya Bendungan Teritip.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, proses pengisian Bendungan Teritip sudah selesai sejak Juli 2017. Bendungan Teritip memiliki kapasitas tampung sebesar 2,43 juta M3 dan diharapkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tahap pertama mampu memasok

setidaknya 200 liter/detik air baku dari total kebutuhan Kota Balikpapan yang mencapai 1.600 liter/detik. Sementara saat ini juga dipasok kebutuhan air baku 1000 liter/detik dari Bendungan Manggar.

“Jika kedua bendungan sudah mampu beroperasi maksimal, maka kekurangan pasokan air baku di Kaltim tinggal sekitar 350 liter/detik bisa diatasi. Ini akan menjadi upaya lanjutan pembangunan infrastruktur Bendungan lainnya agar kebutuhan air baku bisa seluruhnya terpenuhi,” harap Fary.

Ia juga mengungkapkan Komisi V DPR RI pada tahun 2018 ini menyetujui anggaran Kementerian PUPR untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air

(IPA) Tahap I di Kecamatan Balikpapan Timur dengan nilai 91,99 miliar dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya dan ditargetkan selesai pada Oktober 2018.

“Kami terus mendorong pembangunan IPA untuk mendukung berfungsinya Sistem Penyediaan Air Minum Teritip secara berkelanjutan demi terpenuhinya kebutuhan air baku di wilayah Kalimantan Timur,” pungkask legislator dapil NTT ini.

Walikota Balikpapan M. Rizal Effendi yang ikut mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini memaparkan bahwa wilayah Kalimantan Timur sangat tergantung air tadah hujan, sehingga pembangunan Bendungan untuk suplai air baku akan sangat membantu.

“Sementara penggunaan sumur dalam (sumur bor) beresiko keluarnya gas serta masih banyaknya kandungan logam pada air dari sumur dalam. Di sini sulit memperoleh air jernih,” imbuhnya.

Pihaknya juga berterima kasih pada jajaran Komisi V DPR RI yang selama ini turut memperjuangkan anggaran pembangunan Bendungan Teritip sehingga separuh dari anggaran pembebasan lahan Bendungan dibantu dari APBN.

Turut dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno (F-PD), dan sejumlah Anggota Komisi V DPR RI diantaranya Rahmat Nasution Hamka (PDI-Perjuangan), Alex Indra Lukman (PDI-Perjuangan), dan Yoseph Umarhadi (PDI-Perjuangan).

Kemudian, Daniel Muttaqien Syafiudin (Golkar), Saniatul Lativa (Golkar), Agata Sulie Mahyudin (Golkar), Novita Wijayanti (Gerindra), Bahrum Daido (Demokrat), Sungkono (PAN), Abdul Latief Hanafiah (PKB), Nurhasan Zaidi (PKS), Abubakar Wasahua (PPP), dan Soehartono (Nasdem).

■ oji/sf

# Pembangunan Pelabuhan Nggelon Pacitan Harus Dilanjutkan

**Anggota Komisi V DPR RI Gatot Sudjito mengatakan pembangunan pelabuhan Nggelon di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur harus dilanjutkan. Kendati sudah memakan dana APBN sekitar Rp30 miliar, tetapi jalan untuk memasuki kawasan itu masih sangat ekstrem untuk dilalui.**

“Pembangunan jalan menuju ke pelabuhan dan pembangunan pelabuhannya harus diteruskan, karena pelabuhan ini strategis, dan dapat mewujudkan konektivitas tol laut. Jadi harus dikembangkan,” ungkapnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Nggelon dengan didampingi Bupati Pacitan Indartato beserta jajarannya di Pacitan, Jatim, Jumat (31/8).

Gatot menambahkan, setelah pembangunan Pelabuhan Nggelon selesai, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Pacitan dan wilayah sekitar Pacitan seperti Madiun, Tulungagung,

maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus dipererat.

Ia juga mengharapkan Komisi V DPR RI dapat memberikan dukungan dan keputusan politik untuk terwujudnya sebuah pelabuhan yang ini sangat ditunggu-tunggu dalam rangka juga mensukseskan program tol laut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

pelabuhan ini harus dilanjutkan, karena pembangunannya sudah dimulai kurang lebih pada 2011-2012 yang lalu oleh pemerintah daerah. “Artinya ini tidak boleh tidak berkelanjutan karena sudah ada dana, baik dana daerah maupun dana pusat. Itu semuanya dana negara,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Jhoni meminta pembangunan pelabuhan harus berkelanjutan. Pasalnya, jika pembangunan infrastruktur tidak dilanjutkan dan dibiarkan, maka akan termakan oleh kondisi alam. Misalnya banjir, karena pengerjaan drainase tidak tuntas. Apalagi dengan anggaran cukup banyak yang digelontorkan, ia mendorong

**..... pembangunan pelabuhan harus berkelanjutan. Pasalnya, jika pembangunan infrastruktur tidak dilanjutkan dan dibiarkan, maka akan termakan oleh kondisi alam. Misalnya banjir, karena pengerjaan drainase tidak tuntas. Apalagi dengan anggaran cukup banyak yang digelontorkan**



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan pelabuhan Nggelon di Kabupaten Pacitan

Trenggalek, dan Ponorogo. Termasuk berdampak hingga Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. “Itu akan menumbuhkan sebuah peningkatan perekonomian baru. Oleh karena itu saya melihat pada tahun 2019 ini ini harus betul-betul teranggarkan,” harap politisi Partai Golkar ini.

Gatot mengatakan, sinergitas antara Dirjen Laut Kementerian Perhubungan

“Kita akan perjuangkan ini. RAPBN 2019 ini sudah mulai dibahas. Dalam proses pembahasan ini kita akan dorong agar bisa dimunculkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan Nggelon Pacitan dan infrastruktur jalannya,” tutup politisi dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menambahkan bahwa pembangunan

pembangunan pelabuhan dilanjutkan.

“Proyek Pelabuhan Nggelon ini sudah menelan anggaran daerah maupun pusat sekitar Rp30 miliar, jadi harus secepatnya diselesaikan. Dan di tahun 2019 awal nanti harus dimulai kembali pembangunan pelabuhan ini, agar pertumbuhan perekonomian Pacitan bisa lebih baik nantinya,” harap politisi dapil Sumatera Utara itu. ■ azk/sf

# Mall Pelayanan Publik Banyuwangi Bisa Menjadi Contoh Daerah Lain



Tim Kunspek Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh meninjau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh memberikan apresiasi atas keberhasilan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Mall Pelayanan Publik ini, masyarakat cukup hanya mendatangi satu lokasi hanya untuk mengurus berbagai macam izin. Sehingga ini sangat efektif dari segi waktu dan transportasi.

“Terhadap Mall Pelayanan Publik Banyuwangi ini, harus menjadi contoh bagi daerah lain. Sehingga Komisi II berharap bisa mendapat bahan untuk dapat memberi inspirasi ke daerah lain,” ungkap Nihayatul saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, Jatim, Jumat (31/8).

Politisi PKB ini menambahkan, inovasi yang dilakukan Bupati Banyuwangi Azwar Anas ini cukup mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI. Sehingga ke depan diharapkan akan ada “Banyuwangi-Banyuwangi” baru terkait keberhasilan dalam hal pelayanan publik.

Foto: Oji/hr

# Legislator: Pengalaman Pahit Krisis Ekonomi 1998 Jangan Terjadi Lagi

Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Wattimena mengingatkan pengalaman pahit krisis ekonomi tahun 1998 jangan terjadi lagi. Pada tahun 1998 lalu terjadi resesi ekonomi yang diawali terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Akibat resesi ekonomi saat itu, mata uang rupiah Rp2000 per dolar, namun terus melonjak hingga Rp15.000 sampai Rp16.000 per dolar. Kondisi inilah yang perlu diwaspadai,” tutur Michael dalam interupsi di sela-sela Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, pada saat Presiden menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya pada tanggal 16 Agustus lalu, nilai tukar rupiah yang diasumsikan Rp14.400, namun sekarang sudah mencapai Rp 14.900. “Atas kondisi ini, kami ingin Menteri Keuangan menjelaskan secara jujur dan setulus-tulusnya bagaimana kondisi fundamental ekonomi kita,” katanya.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena

“Di daerah lain masih jarang ada pelayanan satu atap. Di Banyuwangi, orang mau nikah di Mall Pelayanan Publik bisa. Sehingga orang dalam satu hari untuk urusan berbagai macam izin tidak perlu pergi dari satu tempat ke tempat lain. Itu harus diapresiasi dari Banyuwangi,” ungkap Nihayatul.

Legislator kelahiran Banyuwangi ini pun terus mendorong Banyuwangi untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru terkait pelayanan publik. Tak hanya itu pariwisata juga didorong untuk terus dikembangkan. Inovasi di bidang pariwisata pun juga mendapat apresiasi Komisi II DPR RI, sehingga dari tahun ke tahun jumlah wisatawan yang datang ke Banyuwangi semakin meningkat.

“Dari sekian banyak inovasi dan potensi di Banyuwangi, salah satunya adalah pariwisata. Dengan adanya konsentrasi di bidang pariwisata ini menarik seluruh komponen lain seperti ketersediaan transportasi dan infrastruktur jalan,” ungkap Nihayatul.

Kunspek ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi II DPR RI diantaranya Komaruddin Watubun, Eddy Kusuma Wijaya, Endro Suswanto Yahman, Abdul Hakam Naja, Firmansyah Mardanoes. Kehadiran rombongan Komisi II ini disambut oleh Bupati Banyuwangi Azwar Anas. ■ hs/sf

Lebih lanjut dia mengatakan, pengalaman kelam krisis ekonomi tahun 1998 jangan sampai terjadi. “Jujur kita tidak mau lagi berada pada suasana kelam seperti tahun 1998. Saat itu semua pembantu Presiden mengatakan fundamental ekonomi kuat, tapi apa yang terjadi akhirnya mengalami resesi. Jangan sampai para pembantu menyenangkan Presiden, tapi ternyata kondisinya sangat memprihatinkan,” jelasnya.

Pemerintah, harap Michael, jangan selalu berlandung di balik ada permasalahan perang dagang AS dan China. Pihaknya juga tidak ingin mendengar lagi ada permasalahan eksternal Amerika, China, Turki dan Argentina. Atau ke depan ada lagi permasalahan eksternal dari negara lain.

“Janganlah kalau ada sesuatu dipersalahkan pihak luar. Kami ingin Kemenkeu menjelaskan disertai fondasi ekonomi kita saat ini,” pungkas politisi dapil Papua Barat ini menambahkan. ■ mp/sf

# Rupiah Anjlok, Legislator Tetap Apresiasi Kondisi Ekonomi Indonesia

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga Rabu (05/9) mencapai angka Rp15.029,65. Dibalik banyaknya kritik yang datang pada pelemahan nilai tukar rupiah tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate justru mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.



Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate

Foto: Eno/hr

**M**enurut Johnny, meskipun rupiah terjadi pelemahan namun fondasi ekonomi Indonesia bisa dikatakan kuat.

Ia pun berpesan agar situasi yang terjadi saat ini tidak diberikan kesan buruk.

“Kita paham dan tahu walau tidak terlalu hebat. Fondasi perekonomian kita baik dan tidak buruk. Jangan diberikan kesan bahwa situasi ekonomi Indonesia memburuk,” ungkap Johnny saat rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9).

Ia pun membandingkan situasi Indonesia dengan negara lain yang memiliki pengaruh cukup besar akibat tekanan global yang semakin tak terkendali ini. Di negara lain seperti Argentina dan Italia, juga terjadi pelemahan mata uang yang lebih parah jika dibandingkan dengan Indonesia. Hal itu yang membuat ia memberikan apresiasi kepada pemerintah karena meskipun terjadi tekanan global, rupiah masih dalam situasi terkendali.

“Di luar sana ada tekanan eksternal yang besar dan kuat yang membuat

rupiah ini melepah. Tapi keseluruhan rupiah masih terkendali, itu harus kita apresiasi,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Ia pun meminta kepada seluruh elite politik untuk bersikap tenang dan tidak membuat kegaduhan, karena kegaduhan-kegaduhan opini tersebut juga turut menyumbang kelemahan rupiah secara psikologis.

“Faktor eksternal ini sangat besar. Ini perlu direspon dengan kekuatan yang kuat yakni solid. Karena ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan ada kesan bahwa kita ini lemah dan saling berantam,” tutur Johnny.

Politisi dapil NTT I ini meminta agar isu mengenai melemahnya rupiah ini tidak dipolitisasi. Perlu ada kekuatan dari semua pihak supaya rupiah kembali pada situasi normal. Semua elite pun diminta untuk menyatukan kekuatan, bukan justru saling menyerang.

“Jangan ada kesan dipolitisasi. Jika ini dilakukan maka kita turut menyumbang peran bagi depresiasi rupiah secara psikologis,” tutup Johnny.

■ hs/sf

# Legislator Nilai Pemerintah Tidak Serius Bina Koperasi dan UKM

**Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang kurang dari Rp1 triliun untuk seluruh Indonesia dinilai sebagai bentuk ketidakeriusan pemerintah dalam membina sektor koperasi dan UKM.**



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno

Pendapat tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno setelah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop UKM dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9). “Pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa akan berkomitmen untuk pengembangan usaha kecil dan menengah ini, tidak terwujud dalam politik anggaran,” ujar politisi fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Teguh, pihaknya merasa prihatin dan berkomitmen untuk terus mengingatkan pemerintah, serta mengingatkan eksekutif, jika memang

serius berpihak kepada koperasi dan UKM, harus ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran untuk membina dan mengembangkan sektor tersebut.

“Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor koperasi, UKM termasuk pengembangan wirausaha muda, setidaknya membutuhkan anggaran diatas Rp1-2 triliun. Tetapi kenyataannya jauh di bawah itu,” tukas Teguh.

Ia mengatakan bahwasanya sektor UKM mampu tetap bertahan ketika krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998. Bukan tidak mungkin, sector ini pula diyakini akan kembali mampu bertahan terhadap terpaan dolar AS yang hampir menyentuh angka Rp15.000.

“Kawan-kawan yang pada umumnya mengandalkan bahan baku lokal, relatif bisa bertahan. Tetapi sekali lagi komitmen pemerintah terhadap mereka masih setengah-setengah,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah ini. ■ es/sf

## Komisi VII Bahas RKA Kemenristekdikti dan LPMK

**Komisi VII DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPMK) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9).**

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyampaikan, berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristekdikti pada 6 Juni 2018 lalu disepakati anggaran indikatif tahun 2019 untuk Kemenristekdikti sebesar Rp1,053 triliun, sedangkan total anggaran indikatif tahun 2019 untuk LPMK sebesar Rp5,228 triliun.

“Pembahasan program di Kemenristekdikti dan LPMK tahun 2019 sudah kita jadwalkan, dan akan dilakukan dalam konsinyering RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I

Kemenristekdikti dan LPMK pada tanggal 12 dan 13 September 2019 mendatang,” ucap Ridwan.

**Rencana kerja pemerintah ada beberapa prioritas nasional yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman**



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam

Sementara itu, Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan bahwa di dalam RKA itu, Kemenristekdikti mempunyai tema rencana kerja pemerintah untuk tahun 2019 adalah

# Jaminan Sosial untuk PMI Belum Efektif

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menyampaikan, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang sudah disahkan ternyata belum memiliki efek yang positif bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini disebabkan karena Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar implementasinya belum berjalan.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI usai mengikuti RDP dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Menara Jamsostek

Foto: Andri/hr

pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.

“Dalam rencana kerja pemerintah ada beberapa prioritas nasional yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman,” papar Nasir.

Kemudian, lanjut Nasir, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya; pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu

Dikatakannya, target capaian kinerja atau sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2019 yaitu meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi di 32,41 persen, meningkatnya relevansi kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi 42,25 persen, dan indeks pendidikan tinggi serta indeks reformasi birokrasi. ■ dep/sf

Pernyataan tersebut di sampaikan sesaat setelah mengikuti rapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, Senin (03/9). Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, hadir juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah.

“Pak Fahri sebagai Pimpinan DPR di sini tentunya lebih melihat dari beberapa komitmen pemerintah, terutama terkait dengan UU PPMI. Sudah lama UU ini kita buat, tapi PP belum berjalan. Sehingga ketika kita berbicara asuransi pekerja TKI, mestinya sudah ditarik dari konsorsium pada BPJS. Tapi kenyataannya di lapangan, masih belum *handle* dengan baik,” jelas Dede.

Setelah ditelusuri melalui dialog dengan para jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan ternyata ada aturan pemerintah yang belum dituntaskan.

“Oleh karena itu, tentunya kita ingin tahu permasalahannya apa. Kita sudah mendengar, salah satunya ada peraturan-peraturan yang belum selesai diberikan pemerintah. Terutama

Permenakernya, PP juga belum keluar,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Dede juga mempertanyakan manfaat apa yang bisa didapatkan para pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata ada benturan-benturan peraturan yang hanya memperbolehkan empat manfaat saja.

“Kita berpikir manfaat apa yang bisa dirasakan pekerja. Kita yang sudah bayar ingin tahu, kita dapat rumah atau tidak, terus anak kita bisa sekolah atau tidak,” selidik Dede.

Menurut politisi dapil Jawa Barat itu, ke depan harus mulai direncanakan pengembangan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi dan harmonisasi antar lembaga guna mensinkronkan program kerja bersama.

“Jadi nanti ada rapat koordinasi tentunya, untuk melihat payung hukum mana yang memang harus perlu kita siapkan, dan yang dibuat oleh pemerintah, dan kemudian berapa lama. Karena kan ini progres bergerak cepat. Sementara kepesertaannya bergerak lambat, beda dengan saudara kembarnya BPJS Kesehatan yang sudah 190 juta peserta,” tutur Dede. ■ eko/sf



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto meninjau korban terdampak gempa di wilayah Kabupaten Lombok Utara

Foto: Ane/hr

## Komisi X Segera Bahas Anggaran Pemulihan Lombok dalam RAPBN 2019

**Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto mengatakan, Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pariwisata dan olahraga akan segera menganggarkan biaya pemulihan pasca bencana gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di bidang pendidikan dan pariwisata dalam RAPBN 2019.**

**D**emikian diungkapkan Djoko saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke daerah terdampak gempa di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), NTB, Senin (03/9). Djoko yang didampingi 3 Wakil Ketua dan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI itu diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

**“Kami juga ingin Kemenristekdikti ikut memperhatikan mahasiswa yang berasal dari Lombok, minimum biaya registrasinya atau biaya semesternya untuk bisa dibantu”**

“Kunjungan kami ke sini betul-betul ingin melihat secara langsung dampak bencana sehingga dalam pembahasan anggaran nanti dapat dipastikan apa saja yang menjadi prioritas. Mudah-mudahan Pak Bupati berkenan memberikan data yang valid terutama mengenai kerusakan fisik sarana pendidikan dan jumlah siswa yang terdampak,” ungkap Djoko.

Kepada jajaran Pemerintah Kabupaten KLU, Djoko mengatakan sebagai bentuk keseriusan Komisi X DPR RI terhadap pemulihan bencana gempa di Lombok, kunjungan ini dihadiri seluruh Kapoksi dari 10 Fraksi, dimana beberapa diantaranya juga adalah Anggota Badan

Anggaran (Banggar) DPR RI, sehingga pembahasan anggaran penanggulangan bencana di Lombok benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Terkait bidang pendidikan, lanjut Djoko, pihaknya mengimbau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk segera mengeluarkan surat edaran kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia. Edaran tersebut mengenai pemotongan biaya pendaftaran maupun biaya kuliah bagi mahasiswa asal Lombok, hingga situasi kembali normal.

“Kami juga ingin Kemristekdikti ikut memperhatikan mahasiswa yang berasal dari Lombok, minimum biaya registrasinya atau biaya semesternya untuk bisa dibantu,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyampaikan, hingga kini kegiatan masyarakat Lombok Utara belum kembali normal. Setidaknya ada 213.000 ribu atau hampir 100 persen warga KLU menjadi pengungsi, 829 orang dirawat inap dan ada 471 orang menjadi korban tewas. “Kemungkinan korban yang meninggal akan bertambah setiap hari karena tidak sedikit juga yang mengalami luka berat,” paparnya.

Sementara itu terkait sarpras pendidikan, ia mengatakan, hampir seluruh sekolah yang ada di KLU rusak, sehingga siswa belum bisa belajar dengan normal. Setidaknya dibutuhkan 1.700 tenda darurat untuk sekolah untuk bisa kembali menormalkan proses belajar mengajar. Sementara baru 20 tenda darurat yang berdiri di KLU. Tak hanya itu, Lombok Utara juga membutuhkan tenaga pengajar, karena tak sedikit guru yang terdampak gempa.

“Harapan kami, kedatangan Komisi X bisa mendorong kementerian terkait untuk membantu penyediaan kelas-kelas darurat, supaya sekolah bisa berjalan dengan normal. Mahasiswa kami juga kesulitan membayar SPP karena kondisi orang tua yang hampir seluruhnya berada di pengungsian. Mudah-mudahan ada kebijakan untuk anak-anak kami, perlu gerakan secara bersama agar Lombok Utara bisa bangkit kembali,” harap Bupati KLU.

Selain meninjau posko pengungsian di Desa Pemenang dan Posko Utama Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Tim Kunspek Komisi X DPR RI juga meninjau destinasi pariwisata yang terdampak gempa di Kawasan Senggigi. ■ ann/sf

# Komisi VIII Dorong Pemerintah Fokus Pemulihan Bencana Lombok

**Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mendorong pemerintah untuk fokus pemulihan bencana gempa bumi di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemulihan pasca gempa itu akan menjadi konsen pembahasan Komisi VIII DPR RI dengan pejabat Eselon I di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).**



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher didampingi para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Foto: Azka/hr

Itu hal yang paling pokok. Pemulihan inilah yang akan menjadi konsen Komisi VIII dalam pembahasan dengan pejabat Eselon I nanti. Aspek pemulihan ini supaya fokus dan program kita berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sekarang,” katanya saat memimpin Rapat Kerja dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9).

Ditambahkan politisi Fraksi PAN ini, aspek politik akan dibicarakan oleh Komisi VIII DPR RI, termasuk perubahan UU Penanggulangan Bencana pada jangka menengah dan panjang. Namun untuk saat ini, fokus pada aspek pemulihan. Dengan demikian akan tercipta rasa aman, tenang dan damai atas hadirnya negara, termasuk DPR RI dalam menanggulangi bencana ini.

Dalam kesimpulan rapat dengan BNPB tersebut, Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNPB 2019 sebesar Rp6,189 triliun yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp206,975 miliar dan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp12 miliar serta program penanggulangan bencana sebesar Rp400,45 miliar.

Komisi VIII DPR RI mendorong penambahan anggaran untuk memperkuat upaya mitigasi dan membangun kesiapsiagaan. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut dengan Pejabat Eselon I BNPB terkait pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Rp514,276 miliar.

Selain itu, usulan tambahan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebesar Rp6,5 triliun untuk dana siap pakai dan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Komisi VIII DPR RI juga meminta BNPB untuk pengalokasian anggaran yang tepat guna dan sasaran untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana. Disarankan pula agar BNPB meningkatkan jangkauan dan sasaran program penguatan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana.

Terakhir, Komisi VIII DPR RI meminta BNPB mengoptimalkan desa tangguh bencana dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, dan memberikan prioritas penanganan bencana yang kejadiannya rutin dan terus-menerus. mp/sf

# Komisi III Minta Mitra Kerja Perhatikan Penyerapan Anggaran Tahun 2018

**Komisi III DPR RI meminta mitra kerjanya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memperhatikan penyerapan anggaran pada tahun 2018 ini untuk masing-masing institusinya.**



Anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan para mitra kerjanya terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) tahun 2019 di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (05/9).

“Kami telah mendengar apa yang direncanakan di tahun 2019, dimana ada yang sudah cukup, ada juga yang masih ada kekurangannya. Namun di sini mohon diperhatikan penyerapan anggaran tahun 2018 yang sudah dianggarkan tahun 2017 itu seperti apa. Jangan sampai anggaran sudah diberikan

pada tahun 2017, tetapi di tahun 2018 ini tidak terserap. Namun di tahun 2019 minta tambahan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin.

Seperti LPSK, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, dimana sampai bulan September 2018 ini baru terserap 64 persen. Apakah dalam tiga bulan ini bisa terserap semua hingga seratus persen. Hal itu tentu bisa menjadi pertimbangan bagaimana nanti tambahan anggaran yang diperlukan kemudian.

“Mudah-mudahan dari penyerapan di tahun 2018 tepat, sekitar 97-98 persen. Sehingga kita dapat memahami kekurangan yang akan diperlukan di program yang akan datang. Saya bisa memahami tantangan tugas ke depan tidak mudah, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut bisa dipahami,” tambahnya.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI yang sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsudin mengungkapkan

## Banggar DPR Kaji RAPBN 2019

**Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya mulai melakukan pendalaman atas RUU tentang APBN 2019 beserta Nota Keuangannya. Pendalaman ini dimaksudkan untuk mengkaji RAPBN agar kredibel dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat luas.**



Suasana Rapat Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah

Azis menjelaskan, sejak pengantar RAPBN 2019 beserta Nota Keuangan yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu, pemerintah menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai wakil pemerintah saat membahas RAPBN 2019 bersama Banggar.

“Berdasarkan nota keuangan bersamaan dengan surat Presiden tanggal 14 Agustus mengenai RUU RAPBN 2019, presiden menugaskan Menkeu, Menkumham, Kepala Bapenas dan Gubernur BI untuk membahas RAPBN 2019 bersama Banggar,” ungkap Azis saat membuka rapat dengan wakil pemerintah tersebut di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9).

Rapat kali ini dimulai dengan penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN 2019 oleh Menteri Keuangan dan pembentukan panja dan timus RUU RAPBN 2019. Adapun dalam hasil rapat



dukungannya terhadap usulan-usulan mitra kerja yang ingin mengajukan tambahan. Namun tentu dengan melihat prioritas yang akan diajukan dan dibahas masing-masing fraksi.

“Usulan-usulan tambahan dalam pagu indikatif berdasarkan nota keuangan tanggal 16 Agustus 2018 kemarin akan kami pelajari terhadap skala prioritas yang dibutuhkan institusi. Tentu dengan memperhatikan silva terhadap penyerapan anggaran tahun 2018 yang masa tenggat waktunya tinggal tiga bulan ke depan, mohon itu menjadi perhatian,” ungkap Aziz.

Dilanjutkan politisi Partai Golkar itu, karena berdasarkan catatan siklus di Banggar DPR RI, besar setiap komisi memiliki perwakilan di Banggar besar, tentu melihat daya serap mitra komisi dalam hal penggunaan anggaran di 2018.

“Fraksi Golkar mendukung penambahan terhadap mitra kerja Komisi III yang ingin melakukan penambahan-penambahan skala prioritas, tentu dengan memperhatikan mekanisme dan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 dalam hal mekanisme dan tata kelola keuangan negara,” pungkasnya. ■ ayu/sf

ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR RI pada bulan Oktober mendatang. “Kita rencanakan akan dibawa pada Rapat Paripurna yang dilakukan penutupannya Oktober,” kata politisi Partai Golkar itu.

Diketahui, pada 16 Agustus lalu Presiden Jokowi telah menyampaikan postur RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya. Pada tahun depan, pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen, serta inflasi pada target  $3,5 \pm 1$  persen. Sementara nilai tukar rupiah diasumsikan Rp14.400 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,3 persen, dan harga minyak mentah Indonesia diasumsikan 70 dolar AS per barel.

Adapun *lifting* minyak bumi ditargetkan sebanyak 750 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi sebanyak 1.250 ribu barel per hari. Selain itu, untuk belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.439,7 triliun. Sedangkan pendapatan negara dan hibah Rp2.142,5 triliun, penerimaan perpajakan Rp1.781 triliun, serta defisit APBN 1,84 persen.

■ hs/sf

# Baleg Upayakan Payung Hukum Pekerja Sosial

**Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat pengharmonisasian RUU tentang Praktik Pekerja Sosial. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Sarmuji ini berupaya memberikan payung hukum agar pekerja sosial yang sudah berdedikasi mendapat penghargaan yang cukup dari negara.**

“Kita ingin para pekerja sosial yang sudah bekerja secara maksimal dan menekuni bidangnya dengan basis keilmuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang selama ini sudah didedikasikan mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk payung undang-undang,” jelas Sarmuji usai memimpin rapat di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, ruang lingkup pekerja sosial yang mendapat payung hukum dari undang-undang ini antara lain, yaitu para pelayan praktik pekerjaan sosial meliputi profesi pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pembangunan sosial, pengembangan sosial, dan perlindungan sosial.

Ia mengatakan profesi yang sudah berdedikasi seperti pada pelayanan sosial selayaknya mendapat penghargaan yang cukup dari negara. “Kira-kira itulah batasan sekaligus ruang lingkungannya, supaya kita betul-betul menangkap apa tujuan di undang-undang ini,” ujar Sarmuji.

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur VI ini memaparkan, profesi pekerja sosial yang sudah tercatat di Kementerian Sosial akan mendapatkan hak dan payung hukum dari negara. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga profesi-profesi lain yang

bisa masuk dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan kriteria yang sebelumnya sudah disebut.

“Batasan pekerja sosial yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang bekerja melaksanakan tugas seperti misalkan Tagana, atau yang seperti ada di Kementerian Sosial, yang ada di panti-panti jompo, panti-panti sosial yang lain. Yang mereka betul-betul menekuni dan mendedikasikan hidupnya di situ. Akan mendapat perlindungan dari negara dalam

bentuk imbal balik yang baik dari negara,” urai Sarmuji. ■

eko/sf



Wakil Ketua Baleg DPR RI Sarmuji

Foto: Rumi/hr



Foto: Rumi/tr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Anggota DPR RI dan Sekjen DPR RI serta pejabat di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI usai membuka kegiatan "Gowes Sehat Bersama Rakyat"

## Lomba HUT DPR Bukti Nyata DPR Bersama Rakyat

**Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memaparkan, seluruh rangkaian lomba dalam memperingati HUT ke-73 RI dan HUT ke-73 DPR RI sejalan dengan komitmen tagar "DPR RI Bersama Rakyat" bukan sekedar simbol semata. DPR RI pun membuka pintu masukan dan kritik dari masyarakat.**

**H**al itu ia ungkapkan saat mendampingi Pimpinan dan Anggota DPR RI membuka rangkaian lomba HUT ke-73 DPR RI yang terdiri kegiatan Gowes Sehat Bersama Rakyat, Lomba Panjat Bambu Betung dan Mewarnai Gedung DPR RI bagi Tingkat Anak-anak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (02/9).

"Memang sekarang tagar 'DPR Bersama Rakyat' yang digaungkan Pimpinan DPR bukan sekedar simbolisasi. Pimpinan DPR sekarang ingin masyarakat lebih memberikan banyak masukan kepada DPR. Jadi kami menjemput bola

mendekati masyarakat dari semua lini, baik dari aspek seperti ini, sepeda atau olahraga," kata Indra.

Indra menjelaskan kegiatan "Gowes Sehat Bersama Rakyat" diikuti lebih dari 1500 peserta. Sedangkan bambu betung

**Memang sekarang tagar 'DPR Bersama Rakyat' yang digaungkan Pimpinan DPR bukan sekedar simbolisasi. Pimpinan DPR sekarang ingin masyarakat lebih memberikan banyak masukan kepada DPR**

yang digunakan pada lomba panjat bambu betung berjumlah 73, sesuai dengan angka HUT ke-73 DPR RI. Sementara Lomba Mewarnai Gedung DPR RI diikuti oleh ratusan anak-anak yang terdiri dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), hingga Sekolah Dasar.

Indra melanjutkan, sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-73 DPR RI, beberapa hari lalu DPR RI juga telah mengadakan Lomba "Kritik DPR", dengan jenis kategori Lomba Meme, Lomba Esai, dan Lomba Stand Up Comedy "Kritik DPR". Sehingga menurutnya, dengan adanya seluruh rangkaian tersebut membuktikan bahwa DPR RI saat ini memang sangat terbuka. "Kita sudah sangat terbuka dan semua pimpinan *happy* dengan semua kritikan dan masukan yang diberikan saat ini," ungkapnya.

Menurut Indra, seluruh peserta yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan komitmen DPR RI untuk memprioritaskan masyarakat luas, meskipun Pegawai DPR RI pun turut andil di dalamnya. Dalam kesempatan acara ini, turut dimenangkan oleh 500 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang menampilkan  *marching band* secara acrobatik. Dan kegiatan Gowes Sehat juga turut disponsori oleh Bank BNI dan Bank Mandiri.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam sambutannya mengatakan, melalui kegiatan "Gowes Sehat Bersama Rakyat" dan lomba lainnya, dirinya merasa sangat gembira dapat berkumpul dan berbaur dengan masyarakat.

Dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini, DPR RI bisa mendapatkan masukan dari masyarakat. Dan berharap kepada Setjen DPR RI agar tahun depan peserta masyarakat bisa mencapai 5000 orang.

Menanggapi tantangan itu, Indra Iskandar akan mengusahakan yang lebih baik lagi ke depannya. Mengingat, tahun ini peserta yang mendaftar mencapai 5000 orang, namun karena keterbatasan dalam mengelola jumlah orang dan pengamanan di jalan maka, hanya bisa menerima 3000 orang.

"Tahun depan kita akan mempersiapkan lebih baik, memang rencana kita tahun depan di atas dari 5000 peserta," katanya seraya menegaskan bahwa DPR RI tetap berkomitmen membuka semua kritikan dan masukan dari masyarakat, sehingga DPR RI dapat memperbaiki diri lagi ke depannya. ■ ndy/sf

# DPR Berhasil Usung Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

**Delegasi DPR RI berhasil mengusung resolusi pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama bagi perempuan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Draft usulan DPR RI itu akan menjadi resolusi pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-39 di Singapura.**

“Kami delegasi Indonesia di WAIPA berhasil mengusung resolusi tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Semua delegasi parlemen negara-negara ASEAN mengapresiasi yang dibawa DPR RI. Ini sangat penting artinya untuk menghilangkan *gap* antara laki-laki dan perempuan,” tandas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf usai mengikuti sidang Women of AIPA (WAIPA) di Singapura, Rabu (05/9).

Nurhayati memimpin langsung delegasi DPR RI dalam *Meeting* WAIPA itu. Ia didampingi Anggota BKSAP DPR RI

Amelia Anggraini, Kartika Yudhisti, dan Endang Srikarti Handayani. Pembahasan draft usulan DPR RI itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, sempat alot. Tapi akhirnya berkat perjuangan delegasi DPR RI, semua draft resolusi itu dapat diterima semua negara peserta WAIPA.

Akses ekonomi bagi para perempuan akan terus dipermudah. Dari akses modal, akses pinjaman, hingga akses pasar produk usaha yang dilakukan perempuan, semuanya dibuka lebar. Pemberdayaan ekonomi perempuan di era digital revolution pun menjadi keniscayaan. Semua delegasi dalam

WAIPA mengapresiasi sekaligus akan memperjuangkan usulan DPR RI itu. Selanjutnya resolusi ini dibawa ke sidang pleno AIPA ke-39.

Dalam rangkaian penutupan Sidang Umum AIPA ke-39 ini, Nurhayati meraih penghargaan dari AIPA, atas dedikasinya pada AIPA, karena telah berkontribusi sekaligus berperan aktif dalam kegiatan AIPA. Penghargaan ini pertama kalinya yang diberikan AIPA kepada delegasi.

Pada acara penutupan, semua delegasi menandatangani resolusi-resolusi yang telah dihasilkan AIPA ke-39 ini. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Juliari P. Batubara menjadi delegasi DPR RI yang menandatangani resolusi yang dihasilkan AIPA ke-39. Selanjutnya penyelenggaraan AIPA ke-40 akan dilaksanakan di Bangkok, Thailand, pada 20-29 Agustus 2019 mendatang. ■ mh/sf



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf serta Anggota BKSAP saat mengikuti Sidang Umum AIPA ke-39 di Singapura



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri sekaligus membuka lomba mewarnai tingkat anak dan panjat bambu betung dalam rangka HUT ke-73 Kemerdekaan RI dan HUT ke-73 DPR RI, di Kompleks Parlemen, Minggu (2/9), Foto: Arief/hr



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Ulugbek Rozukulov di ruang kerjanya, Gedung Nusantara II DPR RI, Jum'at (07/9). Foto: Oji/hr



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima kunjungan diplomasi Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela/ Vice Minister of Foreign Affairs Venezuela for Asia, Middle East and Oceania, H.E MR. Ruben Dario Molinadi Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (03/9). Foto: Jayadi/hr